



Judul : Kompromi Politik Berlanjut ke MPR
Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Kompromi Politik Berlanjut ke MPR

JAKARTA, KOMPAS — Setelah di Dewan Perwakilan Rakyat, kompromi politik difenggang bakal berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seluruh partai politik di parlemen sepakat mendukung Ahmad Muzani dari Partai Gerindra sebagai Ketua MPR meski agenda pemilihan belum berjalan. Kesepakatan itu diakui tidak terlepas dari pembatasan kekuasaan di parlemen ataupun pemerintahan.

Sidang Paripurna dengan agenda pemilihan pimpinan MPR periode 2024-2029 batal dipercepat pada Rabu (2/10/2024) karena Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum menyetujui kandidat yang diajukan. Sidang kemudian disepakati digelar sesuai jadwal semula, Kamis (3/10) ini.

Meski pemilihan pimpinan MPR bukan digelar partai-partai politik pemilik kursi di lembaga itu telah menyepakati paket calon pimpinan MPR yang akan diajukan dalam paripurna. Mereka bahkan disebut sudah satu suara untuk mendukung Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai ketua MPR 2024-2029.

Anggota Fraksi Gerindra MPR yang juga Wakil Ketua DPR, Sufrin Dasc Ahmad mengungkapkan, usulan Cerin-

dra menempatkan Muzani sebagai calon ketua MPR telah didukung seluruh fraksi partai politik. "Penasaran dari Partai Gerindra sudah ditetapkan, Pak Muzani akan maju sebagai calon ketua MPR," ujar Dasc di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Untuk memuluskan jalan Muzani, Gerindra mengemukakan lobi dengan seluruh fraksi partai di MPR. "Partai Gerindra sudah melakukan lobi dengan partai-partai lain sejak Senin kemarin. Dan insya Allah mudah-mudahan hari ini berjalan lancar," kata Rusbe. Maryam, anggota Fraksi Gerindra.

Golkar tak mempersoalkan

Selama beberapa periode terakhir, jabatan ketua MPR diberikan kepada parpol pemilik kursi terbanyak kedua di DPR. Seperti di periode 2019-2024, jabatan ketua MPR diberikan kepada Partai Golkar karena partainya, Golkar, menguasai kursi terbanyak kedua.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, Golkar memperoleh kursi terbanyak kedua, yakni 109 kursi. Satu tingkat di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang meraih 110 kursi, dan setingkat di atas Gerindra yang memiliki 86 kursi. Namun Golkar menandatangani mendukung Muzani menjadi

ketua MPR. Anggota Fraksi Golkar di MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Golkar, Muhammad Fauzi, mengatakan, partainya tidak mempersalahkan jika pada periode ini jabatan tersebut diisi oleh Muzani. Menurut dia, tradisi pemilik kursi terbanyak kedua sebagai ketua MPR tidak wajib dipertahankan. Apalagi, UU MD3 mengatur, ketua MPR

dipilih melalui musyawarah mufakat. Samuji tidak memungkir posisi ketua MPR menjadi salah satu yang juga dibicarakan dengan Gerindra, yakni asal presiden terpilih Prabowo Subianto. Golkar akan mengisi sejumlah kursi menteri di kabinet Prabowo.

Namun, ia menolak jika hal itu dianggap sebagai upaya tukar guling antarfraksi ketua MPR dan posisi di eksekutif. "Jadi ardaikan Golkar mendapat banyak menteri, ya bukan karena tukar ini tukar itu. Tetapi, Pak Prabowo mengetahui benar di Golkar banyak orang dalam kategori *zaken*," katanya.

Samuji pun tidak memungkir kabar bahwa Golkar akan mendapatkan lima kursi menteri. Beberapa di antaranya sudah diusulkan langsung, contohnya, Meutya Hafid dan Bahri Lahadafia.

"Mudah-mudahan bisa lebih (dari lima menteri)," tuturnya.

Dukungan kepada Muzani untuk memimpin MPR juga diungkapkan anggota Fraksi PDI-P MPR, Said Abdallah. Menurut dia, PDI-P mendukung penuh usulan Gerindra itu. Hal itu tidak

terlepas dari faktor posisi Gerindra sebagai partai asal Prabowo. "Dari pandangan PDI-P yang paling pas adalah Pak Muzani. Sebab, bagaimanapun, presiden terpilih harusnya ketua MPR. Itu wajar-wajar saja," ujarnya. Anggota Fraksi PAN MPR, Saleh Partaonon Daulay, juga tak memungkir adanya lobi terkait pemilihan ketua MPR. Kesepakatan untuk memilih ketua MPR cenderung lebih mudah untuk dicapai. "Ketua MPR itu, kan, (dipilih dari) delapan fraksi dan satu kelompok DPD. Kalau fraksinya sudah sepakat semua, tak ada masalah kalau Pak Muzani," ucapnya.

Tadi Rabu kemarin, partai-partai politik juga sudah mengulas nama calon pimpinan MPR, PDI-P misalnya, disebut akan mengusulkan Bambang Wuryanto, Golkar mengusulkan Kahar Muzakkar, Nasdem mengajukan Lestari Moerdijat, dan PKB Rusdi Kirana. Adapun PKS dicabarkan akan mengusulkan Hidayat Nur Wahid, PAN mengajukan Eddy Soejarno, dan Demokrat mengajukan Edhie Baskoro Yudhoyono (NIA, BOW/WIL, DST).